



# LAPORAN KINERJA 2021

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun telah dapat diselesaikan penyusunannya. Dokumen LKj ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan amanah sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan guna menyempunakan perencanaan kinerja selanjutnya. Penyusunan LKj ini sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini merupakan salah satu upaya menuju penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.

Penyusunan LKj 2021 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan Kerjasama para Kepala Satuan Kerja beserta Staf di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tim Penyusun LKj, dan pihak-pihak terkait, diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya, baik dari segi penyajian maupun substansi penyusunan LKj di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, kami berharap semoga LKj Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2021 bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Madiun, Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Madiun

The image shows a circular official stamp of the Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA MADIUN' around the top edge, 'DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA' in the center, and 'MADIUN' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'dr. DENIK WURYANI' is printed in bold, followed by 'Pembina Tingkat I' and 'NIP. 19671227 200212 2 001'.

**dr. DENIK WURYANI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671227 200212 2 001

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tujuan Penyusunan .....	3
1.4. Gambaran Umum.....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>2.1. Rencana Strategis</b> .....	5
1. Tujuan .....	5
2. Sasaran .....	6
3. Indikator Kinerja Utama .....	11
<b>2.2. Rencana Kinerja</b> .....	14
1. Sasaran dan Indikator Sasaran .....	14
2. Program .....	15
3. Kegiatan .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>3.1. Capaian Kinerja Organisasi</b> .....	18
<b>3.2. Realisasi Anggaran</b> .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	58
<b>LAMPIRAN</b> .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tabel 2.2.	Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2.3.	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
Tabel 3.1.	Metode Penyimpulan Capaian Sasaran
Tabel 3.2.	Nilai Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021
Tabel 3.3.	Rincian Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun oleh Inspektorat
Tabel 3.4.	Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2021 dengan target Nilai SAKIP di akhir renstra 2019-2024
Tabel 3.5.	Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran “Hasil Evaluasi Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah” pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021
Tabel 3.6.	Nilai Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat” di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Renstra Sasaran “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat” di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021
Tabel 3.8.	Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Madiun Tahun 2021
Tabel 3.9.	Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat” pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021
Tabel 3.10.	Capaian Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan” di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021
Tabel 3.11.	Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran “Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan” pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk” di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021
Tabel 3.13.	Nilai Capaian dibandingkan tahun sebelumnya pada Sasaran “Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk” di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020 – 2021
Tabel 3.14.	Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra BKKBN
Tabel 3.15.	Perbandingan Capaian TFR Nasional dan Kota Madiun di Tahun 2021
Tabel 3.16.	Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran “Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk” pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021

- Tabel 3.17. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana"
- Tabel 3.18. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat"
- Tabel 3.19. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan"
- Tabel 3.20. Serapan Anggaran pada Sasaran: Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk
- Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
- Gambar 3.1. Perbandingan Hasil Evaluasi Nilai SAKIP Dinkes PP dan KB Tahun 2020 dan 2021
- Gambar 3.2. Perbandingan Persentase Indikator SPM mencapai target Tahun 2020 dan 2021 Kota Madiun
- Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Madiun Tahun 2020 dan Tahun 2021
- Gambar 3.4. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan PP dan KB tahun 2019-2021
- Gambar 3.5. Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Madiun Tahun 2018 – 2021
- Gambar 3.6. Grafik Piramida Penduduk Kota Madiun berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di tahun 2021. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2021, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran diukur capaiannya dan dianalisis dalam LKj ini.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun memiliki empat sasaran di tahun 2021, antara lain meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatnya pengendalian jumlah penduduk. Semua sasaran menunjukkan capaian kinerja di tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan dengan masing-masing capaian kinerja sebesar 101,25%; 116,66%; 103,57% dan 100%. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebesar 105,37% dan berpredikat sangat baik.

Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebesar Rp. 271.050.008.693,00. Secara total persentase penyerapan keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah 89,82% atau terdapat Rp. 27.591.217.911,00 yang tidak terserap. Walaupun terdapat 10,18% anggaran yang tidak terserap, namun pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menunjukkan efisiensi dengan nilai rata-rata efisiensi 1,25%. Dikatakan penggunaan anggaran efisien karena seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, target sasaran dapat tercapai tetapi anggaran dapat dihemat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini berisi tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa terhadap pengukuran kinerja yang menjelaskan keberhasilan atau kurang berhasilnya penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun pada tahun 2021. Selain itu juga merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024 ke dalam perencanaan sasaran, program, dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, berpedoman pada tolok ukur Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Pada tahun 2021 ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Madiun :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

### **1.3. TUJUAN PENYUSUNAN**

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

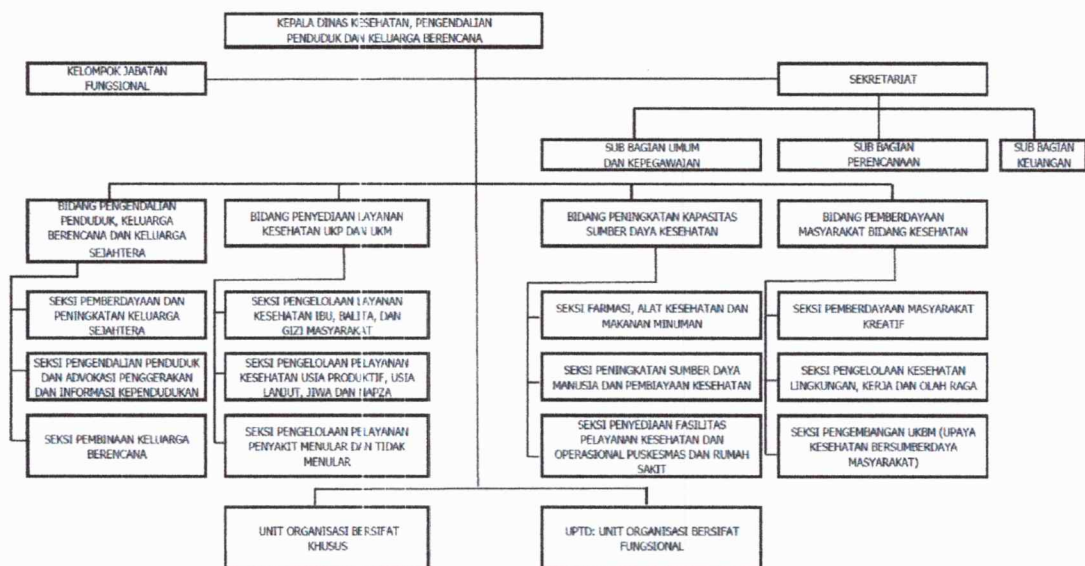
1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya;
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

### **1.4. GAMBARAN UMUM**

Pada Bulan Desember Tahun 2020, struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami perubahan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang status rumah sakit sebagai organisasi bersifat khusus dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Struktur Organisasi dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun

Kondisi-kondisi yang merupakan sebuah ancaman bagi pembangunan kesehatan di Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia tak terkecuali Kota Madiun dan adanya mutasi virus Covid-19 yang menyebabkan adanya gelombang 2 kasus Covid-19 di pertengahan tahun 2021.
2. Era Globalisasi yang membawa dampak buruk pada moralitas masyarakat yang menimbulkan eksekusi di bidang kesehatan.
3. Dengan dimulainya MEA memungkinkan tenaga kerja dan alat kesehatan dari luar Indonesia, masuk dengan mudah ke wilayah Indonesia
4. Perubahan perilaku, gaya hidup dan pola makan masyarakat yang memicu berkembangnya penyakit tidak menular.
5. Perubahan musim yang tidak menentu menimbulkan pengaruh peningkatan penyakit yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang menyuburkan perkembangan vektor penyakit.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019-2024**

##### **1. Tujuan**

Visi Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Salah satu misi dibidang kesehatan adalah misi ke-tiga yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun”**

Berdasarkan Visi Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat”**.

##### **2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai tujuan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat”**, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran untuk tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk

Sasaran pada tahun 2021 tersebut berubah untuk tahun 2022-2024. Perubahan tersebut dikarenakan adanya dinamika perencanaan nasional dan daerah. Perubahan sasaran tersebut menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perubahan ini berfokus pada kinerja sehingga Sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.1  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI
				AWAL	1	2	3	4	5	AKHIR (2024)
				2018	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	<b>Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat</b>		Persentase Keluarga Sehat	0%	0%	50%	52%	54%	56%	56%
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A (Skor)	83,00	83,50	-	-	-	-
		2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	75%	50%	50%	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI
				AWAL	1	2	3	4	5	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	2018	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		3. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81,32	81,77	81,99	-	-	-	-
		4. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	<i>Total Fertility Rate /</i> Angka Kelahiran Total	1,91	1,91	2,1	-	-	-	-
			<i>Contraception Prevalency Rate (CPR)</i> diatas rata-rata Nasional	-	-	-	62,54%	63%	64%	64%
		5. Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Persentase rumah tangga sehat	-	-	-	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
		6. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan	Persentase rumah sehat	-	-	-	62,00%	62,50%	63,00%	63,00%

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR (2024)
				2018	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		7. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Persentase rata-rata Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI	-	-	-	0,52	0,54	0,56	0,56
		8. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Indeks Keluarga Sehat	-	-	-	90,00%	91,00%	92,00%	92,00%
		9. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	-	-	-	84,60%	84,80%	85,00%	85,00%
		10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas	-	-	-	74,00%	76,00%	78,00%	78,00%



Lanjutan Tabel 2.1.

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR (2024)
				2018	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		11. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kefarmasian	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standar	-	-	-	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%
		12. Terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat Kota Madiun	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	-	-	-	86,20	86,40	86,60	86,60
		13. Meningkatnya responsibilitas pelayanan kesehatan	Rata - rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	-	-	-	86,92%	87,53%	88,11%	88,11%
		14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks RB	-	-	-	22,26	22,76	23,26	23,26

### **3. Indikator Kinerja Utama**

Tujuan dan sasaran strategi operasional yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di atas, diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk sasaran tahun 2021.

**Tabel 2.2**  
**Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)**

KOTA : MADIUN

OPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN : 2021

**TUGAS DAN FUNGSI :**

**TUGAS** : Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

**FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan layanan kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan layanan kesehatan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULA</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Inspektorat
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase indikator SPM mencapai target	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM Kesehatan yang mencapai target}}{\text{Jumlah total indikator SPM Kesehatan}} \times 100\%$	Pengelola Program
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014	Survei Kepuasan Masyarakat
4.	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	<i>Total Fertility Rate</i> / Angka Kelahiran Total	Banyaknya anak yang dipunyai oleh 1.000 wanita selama masa reproduksinya	SUSENAS oleh Badan Pusat Statistik dan BKKBN Provinsi Jawa Timur
			$5 \sum \frac{Bi}{Pi} \times 1.000$	
			Keterangan :	
			Bi adalah kelahiran bayi dari seorang wanita pada kelompok umur tertentu	
Pi adalah wanita kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun				

## 2.2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Tahun 2021 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019-2024. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun untuk mencapainya dalam tahun 2021.

Sasaran dan Indikator kinerja kelompok sasaran Dinas Kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
	URAIAN	INDIKATOR	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,5 (Skor)
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase indikator SPM mencapai target	50%
3	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	81,99
4	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	<i>Total Fertility Rate</i> / Angka Kelahiran Total	<2,1

## **2. Program**

Program kerja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2021 antara lain :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- e. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- f. Program pengendalian penduduk
- g. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
- h. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

## **3. Kegiatan**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun memiliki beberapa kegiatan di tahun 2021, antara lain :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
  - 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
  - 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - 2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
  - 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program pengendalian penduduk
  - 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- g. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - 3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- h. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
  - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran dan analisi capaian kinerja menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Metode Menyimpulkan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

NO.	KRITERIA PENGUKURAN	PREDIKAT
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% < X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X \leq 60 \%$	Kurang Baik

c. Mengukur Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi anggaran} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun 2021}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun 2021}}$$

Pada Tahun 2021, capaian kinerja dan penggunaan anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

## 1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

### 1) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Kinerja 2021

Capaian kinerja dengan sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" pada tahun 2021 menggunakan indikator Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

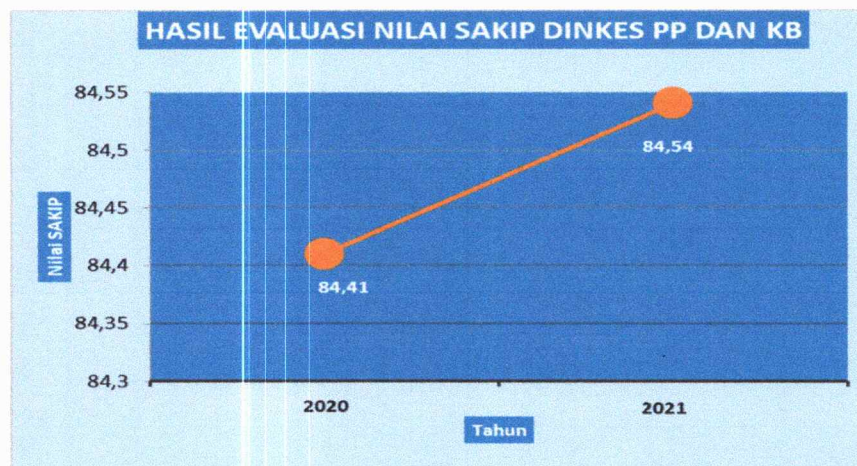
Tabel 3.2. Nilai Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,5	84,54	101,25%	Sangat Baik

Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melebihi target yang ditentukan dan memiliki predikat sangat baik. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan dari Walikota Madiun karena menduduki peringkat ke-2 nilai SAKIP tertinggi di Kota Madiun.

### 2) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Pada Tahun 2020

Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tahun 2021 meningkat nilainya dibandingkan tahun 2020.



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Hasil Evaluasi Nilai SAKIP Dinkes PP dan KB Tahun 2020 dan 2021

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun memperoleh nilai 84,5 atau predikat A (memuaskan). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan nilai SAKIP dibanding penilaian tahun 2020 (84,41) dengan peningkatan sebesar 0,13. Rincian hasil penilaian SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Rincian Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun oleh Inspektorat

Komponen	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi	
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	26,19	30,00
b. Pengukuran Kinerja	25	21,88	21,88
c. Pelaporan Kinerja	15	13,03	12,94
d. Evaluasi Kinerja	10	7,06	7,43
e. Pencapaian Kinerja	20	16,25	12,29
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>84,41</b>	<b>84,54</b>

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari beberapa komponen evaluasi, ada beberapa komponen yang meningkat, ada beberapa komponen yang menurun nilainya pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai yang meningkat yaitu dari sisi perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja. Sedangkan nilai yang menurun yaitu pelaporan kinerja dan pencapaian kinerja.

Penurunan nilai pelaporan kinerja dikarenakan pemantauan terhadap rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Penurunan nilai pada pencapaian kinerja dikarenakan indikator sasaran "meningkatnya pengendalian jumlah penduduk" dengan indikator Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2020 tidak mencapai target. TFR di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 1,98 (96,33% dari target 1,91). Walaupun tidak mencapai target, tetapi kondisi TFR di Madiun jauh di bawah capaian TFR Nasional yang berada pada angka 2,45. Kota Madiun harus mempertahankan jumlah penduduk yang ada di dalamnya untuk menjaga kelangsungan "kehidupan" sesuai dengan kaidah Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yaitu kondisi dimana TFR sebesar 2,1 dan NRR bernilai 1. TFR =2,1 berarti bahwa dua anak akan dapat menggantikan kedua orang tuanya sedangkan NRR=1 berarti seorang ibu akan digantikan oleh anak perempuannya. Dengan kata lain TFR dikatakan baik bila angkanya  $\leq 2,1$ . Dengan demikian walaupun TFR Kota Madiun tahun 2020 belum mencapai target tetapi sudah melampaui capaian nasional dan termasuk dalam kategori baik karena  $< 2,1$ .

### **3) Membandingkan Capaian Kinerja 2021 Dengan Target Akhir Renstra**

Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah tidak lagi menjadi sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun di tahun 2022-2024. Hal ini mengakibatkan indikator sasaran nilai SAKIP tidak bisa dibandingkan capaiannya di tahun 2021 dengan target akhir renstra. Namun, pada tahun 2022-2024, Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah menjadi indikator kinerja Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Jika dibandingkan indikator nilai SAKIP tahun 2021 dengan target di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2021 dengan target Nilai SAKIP di akhir renstra 2019-2024

No	SASARAN		Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021 dibandingkan akhir renstra
	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85	84,54	99,46%

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinkes PP dan KB Kota Madiun tahun 2021 sudah baik jika dibandingkan dengan target akhir renstra (target tahun 2024). Capaian tersebut sudah mencapai 99,46% sehingga masih kurang 0,54% agar target tahun 2024 dapat tercapai.

#### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Tujuan dari evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 yaitu untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP meningkat nilainya dari tahun 2020 dikarenakan ada 2 komponen yang meningkat juga nilainya, yaitu komponen perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam perencanaan kinerja terdapat dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun 2 kali dalam 1 tahun, yaitu renja murni dan renja perubahan. Dokumen Renja tahun 2021 sudah menyesuaikan format dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 sudah menyesuaikan perubahan SOTK berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Evaluasi kinerja sudah dilakukan secara rutin baik dari sisi capaian kinerja maupun serapan anggaran. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dalam bentuk laporan triwulan, laporan simonev dan evaluasi renja. Dengan demikian jika ada kendala dalam mencapai target kinerja maupun serapan akan didiskusikan dan dicari solusinya.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan kinerja Hasil Evaluasi Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah antara lain :

- a. Adanya rencana pelaksanaan kegiatan
- b. Merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan
- c. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seksi, bidang, maupun puskesmas
- d. Adanya evaluasi internal untuk mengetahui progres capaian dan serapan anggaran

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat ketercapaian kinerja antara lain :

- a. Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun belum ditetapkan dengan Peraturan Walikota Madiun.
- b. Pemantauan terhadap rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- c. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen tergantung dengan pengumpulan data dari seksi, bidang, puskesmas dan RSUD untuk menjadi laporan tingkat dinas.

- d. Perubahan peraturan dari beberapa kementerian sangat dinamis sehingga dokumen yang disusun juga mengalami beberapa perubahan.
- e. Serapan kegiatan Insentif tenaga Kesehatan (Inakes) dalam penanggulangan Covid-19 sesuai dengan kasus yang ada sehingga menghambat capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

- a. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kota Madiun terkait penetapan rancangan akhir Renstra Perubahan 2019-2024 agar segera ditetapkan dengan Peraturan Walikota Madiun.
- b. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi guna mengendalikan kinerja serta memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- c. Selalu berkoordinasi dengan seksi, bidang, Puskesmas maupun RSUD terkait batas akhir tanggal pengumpulan laporan sehingga bisa tepat waktu.
- d. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kota Madiun terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga dokumen perencanaan dapat menyesuaikan peraturan terbaru.
- e. Melakukan evaluasi atas ketercapaian kinerja atas indikator sasaran sebagai dasar dalam penetapan target atas indikator sasaran tahun berikutnya.

## **5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki pagu anggaran Rp.



68.817.477.025,00 dengan serapan sebesar Rp. 61.175.882.337,00. Dengan demikian capaian penyerapan anggaran sebesar 88,9%. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran "Hasil Evaluasi Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah" pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021

No	Sasaran	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101,25%	88,90%	1,14%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" sudah lebih dari 1%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

#### 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan "Hasil Evaluasi Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah" yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam program tersebut terdapat 2 kegiatan yang mendukung nilai SAKIP, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh sekretariat Dinas Kesehatan PP dan KB. Kegiatan tersebut mendukung komponen perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal. Sedangkan untuk komponen pencapaian kinerja didukung oleh semua program yang ada di Dinkes PP dan KB karena setiap program mendukung tercapainya target sasaran Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB.

## 2. Sasaran: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat

### 1) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Kinerja 2021

Sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" memiliki indikator Persentase Indikator SPM mencapai target. Indikator SPM yang dimaksud adalah Standap Pelayanan Minimal Kesehatan, dimana terdapat 12 indikator.

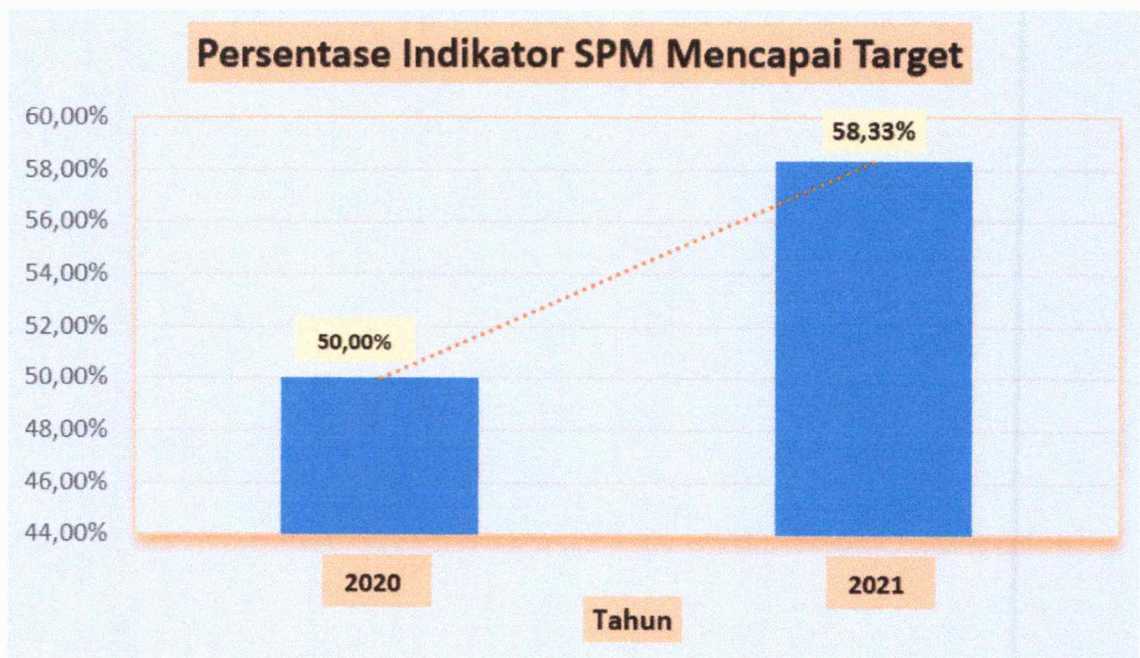
Tabel 3.6. Nilai Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	50%	58,33%	116,66	Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator Persentase Indikator SPM mencapai target sudah melebihi target dan memiliki predikat sangat baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat 7 indikator dari 12 indikator SPM yang sudah memenuhi target.

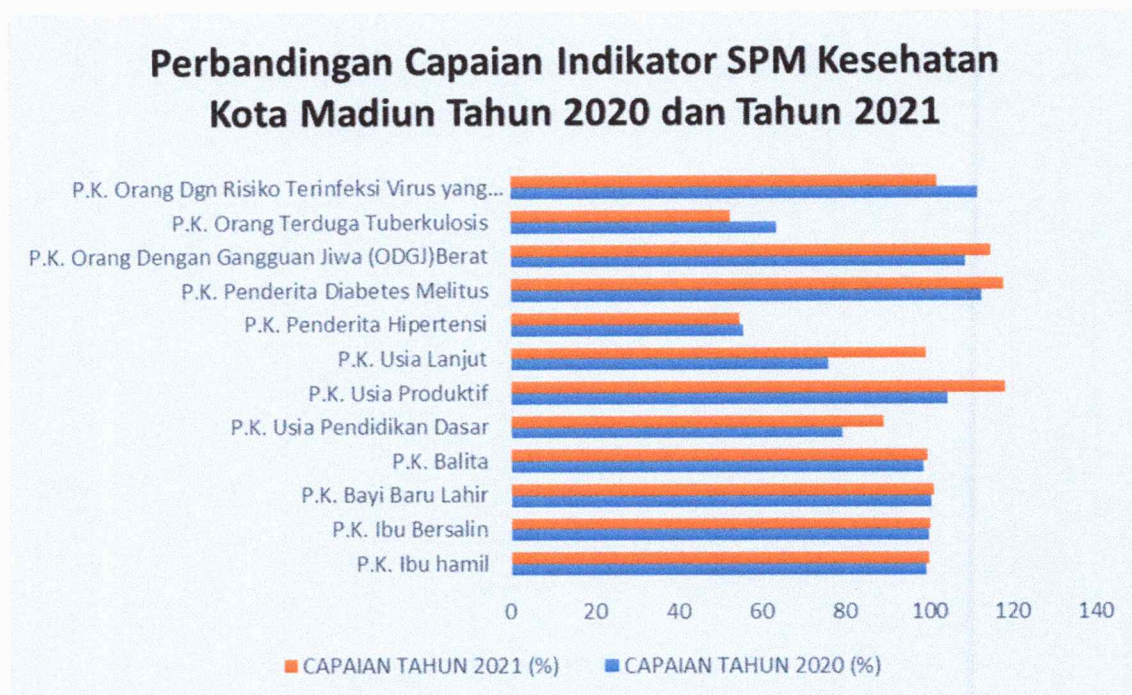
## 2) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2019

Capaian Kinerja Persentase Indikator SPM mencapai target Tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2020, dikarenakan pada Tahun 2020 Indikator Kinerjanya adalah Indeks Keluarga Sehat, yaitu sebesar 0,43. Akan tetapi Persentase Indikator SPM mencapai target Tahun 2021 nilainya meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020 seperti terlihat pada grafik berikut:



Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Persentase Indikator SPM mencapai target Tahun 2020 dan 2021 Kota Madiun

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian persentase indikator SPM mencapai target pada Tahun 2021 naik sebesar 8,33% dibandingkan dengan Tahun 2020. Perbandingan indikator SPM tahun 2020 dengan tahun 2021 sebagai berikut :



Gambar 3.3. Grafik Perbandingan Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Madiun Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat diketahui jika terdapat tiga indikator SPM di tahun 2021 yang nilainya menurun dibandingkan capaian tahun 2020. Tiga indikator tersebut antara lain Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*=HIV), Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 dari awal tahun sampai akhir tahun masih dalam masa pandemi, bahkan terjadi gelombang 2 besar-besaran yang menyebabkan pemerintah memutuskan kebijakan PPKM darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Adanya pandemi tersebut membuat masyarakat enggan untuk mengakses layanan kesehatan. Selain itu kegiatan UKBM yang mendatangkan massa juga ditutup sementara, misalnya posbindu PTM.

Terdapat sembilan indikator yang capaiannya meningkat di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Indikator tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan kegiatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dibarengkan saat kegiatan vaksinasi covid-19 sehingga dapat meningkatkan capaian program; pelayanan kesehatan ibu, bayi dan

balita di puskesmas tetap berjalan dengan memperhatikan protokol Kesehatan; Kegiatan skrining usia pendidikan dasar dilakukan dengan menggunakan *google form*; Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) sudah mulai berjalan/beraktifitas lagi; skrining usia produktif menjadi paket wajib di seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan PP dan KB yang mendatangkan banyak orang, khususnya usia 15 tahun ke atas.

### 3) Membandingkan Capaian Kinerja 2021 Dengan Target Renstra Target Akhir Renstra

Sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" tahun 2021 tidak menjadi sasaran di tahun berikutnya. Dengan demikian sasaran tersebut juga tidak muncul di akhir periode renstra. Namun, indikator Persentase indikator SPM mencapai target turun menjadi indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Perbandingan indikator persentase SPM mencapai target tahun 2021 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Renstra Sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021 dibandingkan akhir renstra
1	Persentase Indikator SPM Mencapai Target	75,00%	50,88%	67,84%

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk Persentase SPM mencapai Target tahun 2021 masih kurang 24,12% untuk mencapai target kinerja di akhir renstra mendatang. Perlu adanya upaya yang lebih lagi untuk meningkatkan capaian SPM Kesehatan agar target di akhir tahun periode renstra dapat tercapai.

#### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kota Madiun dan capaiannya di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8. Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Madiun Tahun 2021

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,29
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	101,19
4	Pelayanan Kesehatan Balita	99,78
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	89,26
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	118,39
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	99,33
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	54,99
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118,04
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	115,09
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52,68
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	102,10

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator yang masih di bawah target (100%). Alasan tidak tercapainya target indikator SPM antara lain :

a. Pelayanan Kesehatan Balita

Balita belum bisa dipantau secara rutin dikarenakan banyak wilayah RW (wilayah posyandu) berada dalam zona merah atau risiko tinggi penularan Covid 19 sehingga kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa ditunda pelaksanaannya.

b. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Selama pandemi skrining dilaksanakan dengan menggunakan *google form*. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya karena hanya bergantung kepada kemampuan (pemahaman atas pertanyaan dalam

*google form*, kemauan siswa (tidak ada kewajiban mengisi dari sekolah) yang mengisi tanpa bisa diintervensi secara langsung oleh petugas puskesmas (hanya mengandalkan koordinasi antara guru dan siswa), siswa tidak memiliki HP yang mendukung *google form*, siswa pada pondok pesantren tidak membawa HP, wali murid berada di luar kota sehingga tidak bisa memantau anaknya dalam mengisi *google form*.

c. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan kegiatan yang mendatangkan masyarakat secara langsung belum bisa maksimal dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

d. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Sasaran SPM Hipertensi sangat tinggi berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018. Kota Madiun memiliki prevalensi hipertensi tertinggi di Jawa timur berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Data tersebut tidak sesuai dengan data *riil* di lapangan karena metode pengambilan data Riskesdas menggunakan sampling. Disamping itu, adanya pandemi covid juga menyebabkan penderita hipertensi enggan untuk mengakses layanan Kesehatan.

e. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian SPM Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis belum mencapai target, hal ini disebabkan selama pandemi, kegiatan penemuan aktif oleh kader melalui investigasi kontak, kegiatan ketuk pintu (melakukan skrining/pemilahan untuk menemukan orang yang terduga terkena penyakit Tuberkulosis (TB) serta merujuk orang tersebut ke fasilitas Kesehatan atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan) di masyarakat tidak dapat dilaksanakan sehingga penemuan kasus hanya dari penemuan pasif saat pasien datang ke layanan. Sedangkan penemuan di layanan juga menurun karena masyarakat takut mengakses layanan kesehatan saat pandemi. Sebelum pandemi, masyarakat yang sakit mengarah ke TB dapat langsung memeriksakan diri, akan tetapi selama pandemi dikarenakan gejala TB mirip dengan gejala Covid sehingga takut didiagnosa sebagai suspek covid-19.

Beberapa faktor yang mendorong pencapaian target pada sasaran antara lain :

- a. Pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita di puskesmas tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- b. Adanya kegiatan mobile *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) pada kelompok kunci.
- c. Kegiatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dibarengkan saat kegiatan vaksinasi covid-19 sehingga dapat meningkatkan capaian program.
- d. Kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk pelaksanaan kegiatan.
- e. UKBM sudah mulai berjalan/beraktifitas lagi, skrining uspro menjadi paketan wajib di seluruh kegiatan yang dilaksanakan dinkes dan puskesmas yang mendatangkan banyak orang khususnya usia 15 tahun keatas.
- f. Pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik ditandai dengan adanya kader Posbindu PTM dan kader Kesehatan jiwa.

Sedangkan beberapa faktor yang menghambat pencapaian target antara lain :

- a. Dengan adanya pandemi Covid 19 maka kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa ditunda pelaksanaannya dan jumlah kunjungan di fasilitas pelayanan Kesehatan mengalami penurunan untuk kunjungan rawat jalannya.
- b. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan ada beberapa balita yang tidak melakukan penimbangan minimal 8 kali dalam setahun sehingga cakupan pelayanan balita tidak mencapai target.
- c. Kegiatan hari TB Sedunia sempat terhenti saat pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat menambah cakupan kasus TB.
- d. Belum semua layanan/fasilitas Kesehatan/Bidan Praktek Mandiri yang melaporkan kasus TB *all case* dan hasil investigasi kontak, *mandatory notification* belum berjalan optimal.
- e. Belum semua layanan/fasilitas Kesehatan tingkat 1 yang melaporkan kasus surveilans PTM dan Kesehatan jiwa sehingga hasil capaian belum optimal.



- Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :
- a. Membangun komitmen untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat dengan mematuhi protocol Kesehatan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.
  - b. Meningkatkan Gerakan 115 (1 kasus TB dilakukan investigasi 15 kontak eratnya untuk meningkatkan capaian kasus TB di tengah pandemi Covid-19 melalui media elektronik;
  - c. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor agar pelaksanaan kegiatan dan hasil berjalan sesuai dengan yang direncanakan, termasuk dalam hal pelaporan kasus TB, penyakit menular dan gangguan jiwa.

#### 5) ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Program yang mendukung sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pagu untuk program tersebut di tahun 2021 Rp. 197.401.588.778,00 dengan serapan sebesar Rp. 178.575.933.300,00 sehingga besarnya penyerapan sebesar 90,46%.

Tabel 3.9 Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021

No	Sasaran	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	116,66%	90,46%	1,29%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" lebih dari 1%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

#### **6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang tercapainya sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan dalam program tersebut yang menunjang sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat" yaitu kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam kegiatan tersebut terdapat 12 indikator yang menjadi SPM Kesehatan, antara lain :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Nama sub kegiatan yang langsung terarah ke SPM Kesehatan ini mulai dilaksanakan di tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya sub kegiatan yang langsung merujuk ke SPM Kesehatan, diharapkan kedepannya SPM Kesehatan dapat tercapai targetnya karena lebih fokus dan terarah.

**3. Sasaran: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan**

**1)Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Kinerja 2021**

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan menggunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Capaian IKM tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

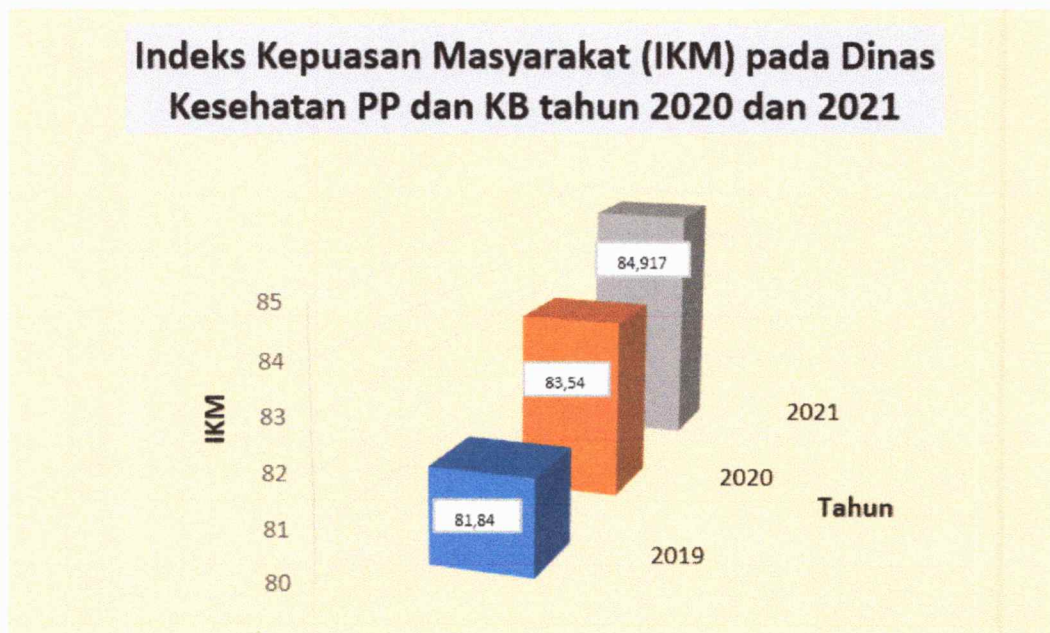
Tabel 3.10. Capaian Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	81,99	84,917	103,57	Sangat Baik

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai IKM pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun memiliki kategori Baik karena terdapat pada rentang 76,61-88,30. Sedangkan berdasarkan target yang sudah ditetapkan tahun 2021, nilai IKM sudah melebihi target dan memiliki predikat Sangat Baik karena sudah melebihi 100%.

## 2) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Capaian Kinerja Pada Tahun 2020

Survei kepuasan masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dilakukan setiap tahun sehingga dapat menggambarkan seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan PP dan KB.



Gambar 3.4. Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan PP dan KB tahun 2019-2021

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinkes PP dan KB mengalami peningkatan secara berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan juga meningkat karena kepuasan masyarakat pun semakin meningkat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan PP dan KB. Diharapkan setiap tahun nilai IKM pada Dinas Kesehatan PP dan

KB meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbaikan layanan kepada masyarakat.

### **3)Membandingkan Capaian Kinerja 2021 Dengan Target Akhir Renstra**

Sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan" tidak lagi menjadi sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun di tahun 2022-2024 sesuai dengan dokumen Renstra. Dengan demikian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun tidak bisa dibandingkan capaian tahun 2021 dengan target akhir renstra.

### **4)Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan yang melibatkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Formula indikator ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan realisasi kinerja 84,917 di tahun 2021, dengan kata lain capaian kinerjanya mencapai 103,57%.

Berdasarkan hasil survei IKM< Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan pelayanan, antara lain:

- a. Menetapkan aturan mengenai tata cara penerimaan pelayanan, menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).
- b. Melakukan evaluasi perilaku petugas pelayanan terutama dalam menjelaskan informasi pelayanan.
- c. Meninjau urgensi penyediaan sarana penunjang seperti tempat fotocopy.
- d. Memastikan sarana dan prasarana toilet lebih terjaga kebersihannya. Melengkapi dengan sarana pendukung seperti tempat sampah,

sabun, tissue, pengharum kamar mandi, dan memastikan kondisi air mengalir dengan lancar.

- e. Memastikan sarana dan prasarana kursi di ruang tunggu terawat dan dapat difungsikan dengan baik. Memastikan jumlahnya kursi memenuhi jumlah pengunjung yang datang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Faktor pendorong keberhasilan dan peningkatan kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu :

- a. Kesadaran petugas terhadap kepatuhan SOP Pelayanan, terutama penerapan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.
- b. Adanya dukungan dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk membantu pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja bangunan/gedung/ruang.
- c. Kerja sama yang baik dengan BPJS Kesehatan termasuk dalam rekonsiliasi data kepesertaan.
- d. Cakupan vaksinasi Covid-19 di Kota Madiun tinggi karena memaksimalkan pencapaian program melalui pelayanan vaksinasi dalam gedung dan *mobile* vaksinasi.

Terdapat beberapa hal yang dapat menghambat peningkatan IKM, antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah tenaga sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dan alur yang ditetapkan.
- b. Masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut survei dari segi pelayanan ke masyarakat, seperti keramahan, kelengkapan informasi yang disampaikan dan sarana prasarana pelayanan.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan IKM antara lain :

- a. Mengusulkan tambahan tenaga di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- b. Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil survei IKM agar pelayanan dapat lebih baik dan masyarakat dapat lebih puas.

### 5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang mendukung sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan" yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Pagu untuk program tersebut di tahun 2021 Rp. 1.544.915.650,00 dengan serapan sebesar Rp. 1.343.356.441,00 sehingga besarnya penyerapan sebesar 86,95%.

Tabel 3.11. Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan" pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021

No	Sasaran	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	103,57%	86,95%	1,19%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan" lebih dari 1%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

### 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan" antara lain Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Dalam tiga program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan Indeks Kepuasan

Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- d. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara langsung yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun antara lain pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran Daerah (JKN PBID), pelayanan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan, pelayanan perizinan sarana kesehatan dan perizinan tenaga kesehatan.

#### **4. Sasaran: Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk**

##### **1) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Kinerja 2020**

Sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" ini diukur keberhasilannya dengan indikator *Total Fertility Rate* (TFR) sebagai berikut :



Tabel 3.12. Capaian Kinerja dan Predikat Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	<2,1	2,1	100%	Sangat Baik

Capaian TFR (*Total Fertility Rate*) di atas menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hasil capaian kinerja pada indikator Sasaran Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk mendapatkan predikat Sangat Baik dan mencapai target tahun 2021.

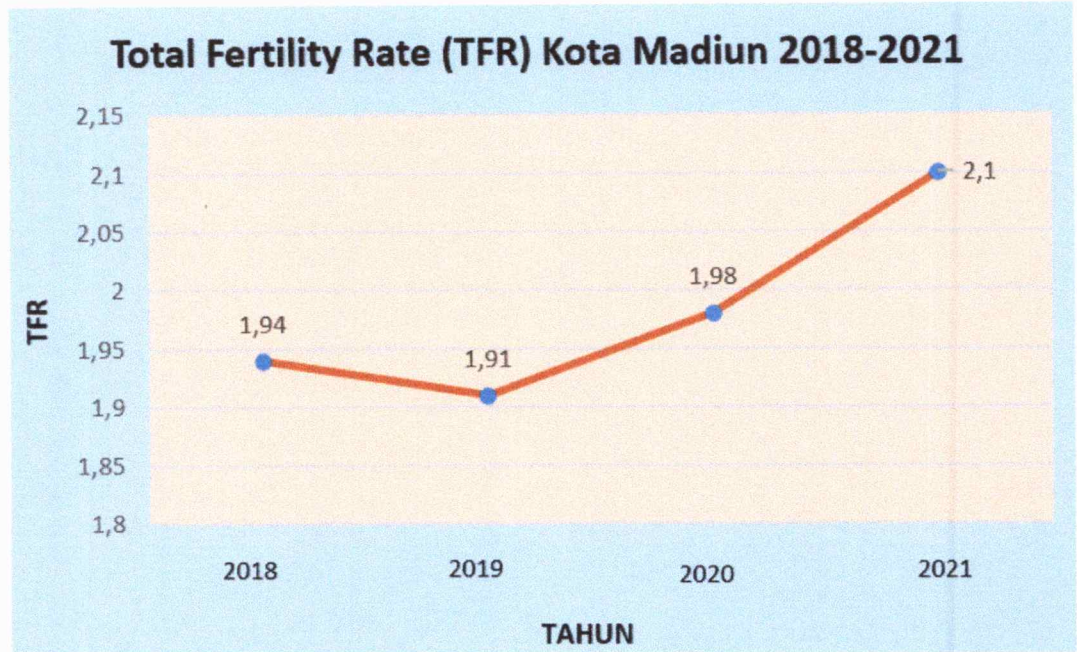
## 2) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Capaian Kinerja Pada Tahun 2020

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap capaian kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13. Nilai Capaian dibandingkan tahun sebelumnya pada Sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Tahun 2020 – 2021

No	SASARAN		2020	2021
	Uraian	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR) / Angka Kelahiran Total	96,34	100,00

Berdasarkan capaian kinerja, TFR tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yaitu meningkat 3,66%. Perkembangan TFR di Kota Madiun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

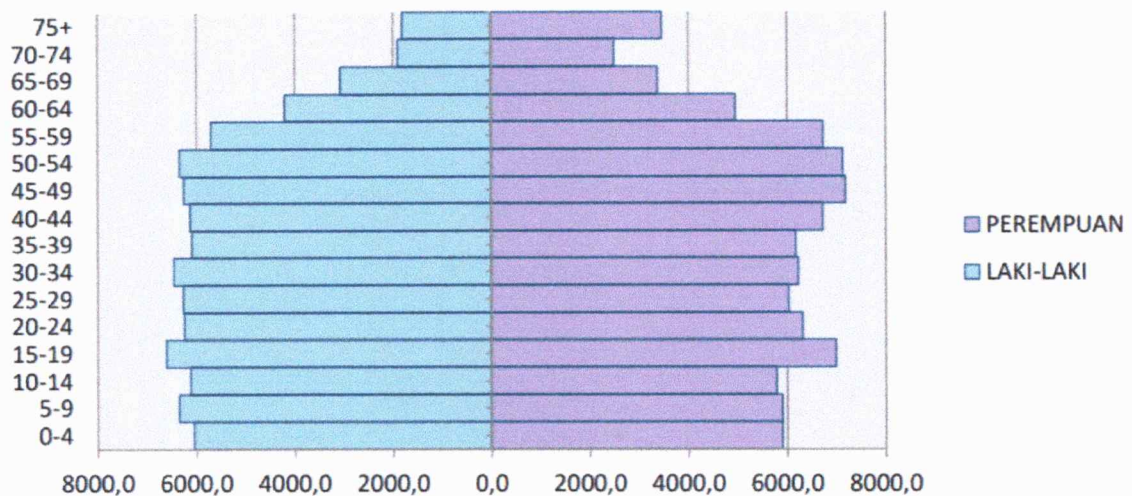


Gambar 3.5 Grafik Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Madiun Tahun 2018 – 2021

TFR Kota Madiun Tahun 2018-2021 memperlihatkan tren turun dan naik. TFR di Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan hasil capaian tahun 2020. Hal ini harus menjadi perhatian di tahun tahun berikutnya walau bila dibandingkan dengan TFR Nasional di tahun yang sama (2,26) masih ada di bawahnya. TFR Kota Madiun masih terkendali dan harus dipertahankan pada posisi angka  $\leq 2,1$  agar Bonus Demografi bisa diperpanjang durasinya. Hal ini seperti yang terungkap dalam Peraturan BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa untuk mempertahankan struktur penduduk agar dapat mempertahankan "bonus Demografi", maka diperlukan upaya pengendalian angka kelahiran total/ *Total Fertility Rate*. Sementara itu, Pertumbuhan Penduduk Seimbang bila TFR bisa dipertahankan di angka  $\leq 2,1$ . Artinya dengan TFR 2,1 ini Kota Madiun bisa mempertahankan durasi "Bonus Demografi"-nya. Bonus Demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15 -64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan usia penduduk non produktif (usia < 15 tahun dan > 64 tahun). Dengan kata lain dikatakan bonus demografi bila 1 orang non produktif ditanggung oleh 2 orang produktif. Yang harus diperhatikan ke depan adalah mempersiapkan penduduk usia produktif di Kota Madiun agar benar benar menjadi

produktif. Pada tahun 2020, komposisi penduduk di Kota Madiun didominasi oleh penduduk usia produktif sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun sudah mendapatkan bonus demografi. Selanjutnya, piramida penduduk per kelompok umur dan jenis kelamin Kota Madiun pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**PIRAMIDA PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN KOTA MADIUN**



Sumber : Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun Tahun 2020 diolah PUSDATIN Kementerian Kesehatan, 2020

Gambar 3.6. Grafik Piramida Penduduk Kota Madiun berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif Tahun 2020

Alasan peningkatan TFR di Kota Madiun yaitu :

1. Kondisi Pandemi, menjadikan masyarakat pengguna layanan KB enggan datang ke fasilitas layanan KB karena takut tertular covid-19, terbukti dengan turunnya Capaian CPR dan naiknya *Unmet Need* serta naiknya capaian KB jenis Pil dan kondom.
2. Adanya ketentuan khusus untuk layanan KB sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru.
3. Kegiatan KIE tentang program bangga kencana tidak bisa dilakukan sebanyak dan seintensif sebelum masa pandemi Covid-19.

### 3) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Akhir Renstra

Capaian indikator TFR pada tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan target akhir renstra karena indikator sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" berubah tahun 2022-2024 menjadi *Contraception Prevalency Rate* (CPR) di atas rata-rata Nasional. Namun perbandingan capaian TFR Kota Madiun Tahun 2021 dengan target akhir renstra TFR Nasional tahun 2024 yaitu :

Tabel 3.14. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra BKKBN di Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja 2021 Kota Madiun	Target akhir Renstra BKKBN 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,1	2,1	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian TFR Kota Madiun tahun 2021 sudah mencapai target akhir periode renstra BKKBN tahun 2024. Diharapkan capaian TFR Kota Madiun tetap dipertahankan di kisaran angka  $\leq 2,1$ .

### 4) Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Capaian Nasional

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian TFR Nasional dan Kota Madiun di Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Capaian Indonesia	Capaian Kota Madiun
1	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) / Angka Kelahiran Total	2,26	2,1

Tabel di atas menggambarkan Capaian TFR di Kota Madiun sudah baik, kondisi TFR ini menunjukkan bahwa pengendalian jumlah penduduk di kota Madiun sudah terkendali dan harus tetap dipertahankan.

## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Konsep Definisi *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Kegunaan diketahuinya TFR untuk suatu daerah adalah membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran dan prioritas pelayanan kesehatan menurut struktur penduduk di Kota Madiun ke depan.

Dengan capaian TFR yang sudah baik ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Madiun telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengendalian penduduk dengan mengintegrasikan kebijakan kependudukan kedalam kebijakan pembangunan.

Faktor pendorong Pencapaian indikator TFR antara lain :

1. Adanya pertemuan kegiatan penyediaan dan pengembangan materi kependudukan bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sehingga SSK makin dirasa kegunaannya bagi warga sekolah khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dan pemahaman tentang perilaku siswa dengan dampak dari perkembangan penduduk yang ada di sekitarnya.
2. Adanya kegiatan pemantauan pengisian data di aplikasi Kampung KB terutama kegiatan yang bersifat intervensi. Kampung KB adalah miniatur pengelolaan program bangga kencana oleh masyarakat di tingkat terkecil yang dilakukan secara terpadu dengan beberapa lintas sektor dan program. Hasil kegiatannya harus selalu diamati dan dievaluasi sebagai cara penentuan Rencana Kegiatan di tahun berikutnya. Hasil hasil keg tersebut harus tersajikan dan salah satunya dengan pengisian data di aplikasi ini.
3. Pembinaan dan evaluasi kader dasyat untuk mendampingi kasus *Unmet Need* (UN) yang ada di wilayahnya untuk menjadi peserta KB. Pendampingan secara intensif dari data Pendataan Keluarga (PK 21) *by name by adress* menjadikan UN sebagai "sasaran prioritas" untuk peningkatan peserta KB Baru di Kota Madiun.

4. Adanya sarana penunjang penyuluhan dalam bentuk permainan yang lebih menarik sehingga menarik antusiasme anggota poktan untuk ber-KB, selain tetap terus meningkatkan pembinaan ke poktan.
5. Adanya dukungan dana yang berasal dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Pemerintah Pusat selain dana dari Pemerintah Kota Madiun.

## 6) Efisiensi Anggaran

Program yang mendukung sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang total pagunya Rp. 3.286.027.240 dengan serapan Rp. 2.363.618.704 (71,93%).

Tabel 3.16. Penilaian Efisiensi Penyerapan Anggaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun 2021

No	Sasaran	% Rata-Rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	100,00%	71,93%	1,39%

Penilaian efisiensi penyerapan anggaran dengan sasaran "Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk" lebih dari 1%. Hal tersebut berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan terlaksana dengan baik dan target sasaran tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan sasaran "Meningkatnya pengendalian Jumlah Penduduk" yaitu:

- 1) Program Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

### 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dalam 3 (tiga) program tersebut, terdapat kegiatan, antara lain :

- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 4) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- 5) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- 6) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 7) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengendalian jumlah penduduk, dengan memperkuat program bangga kencana yaitu Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk bertujuan untuk meningkatkan implementasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dengan berdasarkan data keluarga yang terus ter"*update*" telah memberikan hasil terkendalinya Angka Kelahiran Total (2,1), Meningkatnya Kampung KB yang sesuai standar paripurna di 3 Kampung KB (Kampung KB Gedongan Prima Manguharjo, Kampung KB Kapendis Rejomulyo dan Kampung KB Sejahtera Klegen), dan 4 Sekolah Siaga Kependudukan telah dibentuk dengan 3 sekolah sudah berstandartkan paripurna (MAN 2, SMK Adi Tapa dan SMAN 1 Madiun).

Kegiatan pelaksanaan KIE dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan lini lapangan berdampak dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang tergabung dalam kelompok kegiatan maupun di Kampung KB yang terpapar program Bangga Kencana sehingga bisa menurun *Unmet Need* (Peserta KB yang belum terlayani). Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir, menjadikan upaya untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam menyampaikan program Bangga Kencana ke masyarakat terus dilakukan selain penyuluhan maupun pertemuan yang bersifat *offline* namun tetap berpedoman pada Adaptasi Kebiasaan Baru. Penggunaan aplikasi daring untuk meningkatkan kualitas petugas penyuluh KB dan kader serta pemberian materi bangga kencana ke masyarakat melalui grup-grup *Whatsapp* (WA) terus dilakukan dan ditingkatkan selain tetap melakukan pemberian informasi melalui media media cetak.

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB khususnya yang sudah ber"MoU" dan terdata dalam basis data Ko (K nol) dapat meningkatkan kepesertaan keluarga sasaran dalam ber-KB dengan memudahkan akses serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang mencukupi. Adanya program BPJS PBID yang menjadikan Kota Madiun menjadi kota *Universal Health Coverage* (UHC) juga memudahkan akses masyarakat untuk ber-KB karena semua layanan KB di Kota Madiun diberikan secara gratis asal sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan momentum pelayanan KB khususnya KB MKJP telah banyak dilakukan di masyarakat, Pemberian "*Reward*" uang tunggu pasca pelayanan KB Kontrasepsi Mantap telah diberikan, Santunan dalam bentuk bantuan "paket kelengkapan bayi" telah disediakan untuk kasus kegagalan disamping layanan lain yang tidak berbayar. Semua kegiatan ini di atas berdampak dalam mempertahankan angka KB MKJP di Kota Madiun dikisaran angka 40% dari akseptor yang ada.

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam pelayanan dan kepesertaan ber-KB di Kampung KB dalam bentuk kegiatan pencarian masalah di Kampung KB melalui



rapat Pokja Kampung KB, Forum Kampung KB dan Mini lokakarya Kampung KB menjadikan beberapa masalah di Kampung KB dapat terurai termasuk permasalahan yang melibatkan OPD terkait dalam penyelesaiannya sudah bisa dilakukan.

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui pembinaan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, dan UPPKA juga memberikan andil dalam penyiapan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keikutsertaan PIK-R, Insan GenRe (Duta GenRe) dan Saka Kencana untuk menysasar kelompok remaja dalam berkegiatannya juga berperan dalam upaya meningkatkan Usia Perkawinan, Mencegah Seks Bebas dan Napza. Namun kegiatan yang perlu dukungan lebih kuat lagi adalah mengaktifkan poktan, peningkatan kepesertaan keluarga sasaran di poktan sesuai kelompoknya dan meng"KB"kan anggota poktan harus diperkuat lagi.

Terkendalnya angka TFR di  $\leq 2,1$  yang menunjukkan keberlangsungan layanan KB yang makin baik menjadikan komposisi penduduk Kota Madiun bisa terkendali dan akan berdampak pada memperlama durasi "Bonus Demografi" di Kota Madiun. Dengan kondisi ini mewajibkan kita untuk memastikan bahwa penduduk usia produktif harus benar benar produktif, peningkatan kemampuan dan ketrampilan penduduk usia produktif harus selalu disiapkan, mulai dari memudahkan akses sekolah dan lapangan pekerjaan. Bonus demografi merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan. Bila tidak, Bonus Demografi bukan menjadi berkah malah berubah menjadi petaka.

Makin meningkatnya Angka Harapan Hidup dan baiknya IPM di Kota Madiun, menyebabkan penduduk yang ada di kelompok Lansia akan meningkat. AHH yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan jumlah Penduduk yang menua (*Aging Population*) sehingga upaya pengelolaan penduduk usia lanjut perlu disiapkan dengan baik. Layanan dan kebijakan publik yang berpihak kepada lansia harus diperbanyak. Kemampuan keluarga untuk menciptakan "Lansia Tangguh" harus

segera dilakukan, karena masih banyak pengelolaan penduduk lansia masih mengandalkan pada kegiatan komunitas.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

#### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja" didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdapat di tingkat Dinas Kesehatan PP dan KB maupun di tingkat RSUD Kota Madiun dan menjadi program rutin.

Tabel 3.17. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana"

NO	SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.817.477.025	61.175.882.337	88,9%
<b>JUMLAH</b>				<b>68.817.477.025</b>	<b>61.175.882.337</b>	<b>88,9%</b>

Serapan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 di Dinas Kesehatan PP dan KB dengan total capaian serapan sebesar 88,9%. Sehingga masih terdapat 11,1% anggaran yang tidak terserap. Beberapa hal yang menyebabkan kegiatan tidak terserap 100% antara lain adalah:

- a. Anggaran tidak bisa terserap semua karena sesuai kebutuhan, tagihan rekening yang ada dan efisiensi anggaran;
- b. Jumlah Kendaraan dinas melebihi jumlah pengemudi, sehingga perawatan, pemantauan dan pemeriksaan kendaraan dinas tidak bisa maksimal;

- c. Serapan insentif tenaga Kesehatan (INAKES) dalam penanggulangan pandemi Covid-19 sesuai dengan kasus yang ada sehingga Ketika tidak ada kasus, maka insentif juga tidak bisa terserap.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah:

- a. Perencanaan perhitungan kebutuhan untuk kedepannya lebih dioptimalkan;
- b. Pengawasan dan pemeriksaan kendaraan dinas secara berkala dan lebih maksimal.

## 2. Sasaran: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat

Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat didukung oleh satu program, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program ini terdapat di Dinas Kesehatan PP dan KB, puskesmas maupun RSUD Kota Madiun.

Tabel 3.18. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Sehat"

NO	SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	197.401.588.778	178.575.933.300	90,46%
<b>JUMLAH</b>				<b>197.401.588.778</b>	<b>178.575.933.300</b>	<b>90,46%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan mencapai 90,46%, sehingga ada sebesar 9,54% anggaran yang tidak diserap.

Hal ini dikarenakan antara lain:

- a. Ada beberapa kegiatan yang mendatangkan banyak orang tidak bisa dilaksanakan karenan pandemi Covid-19;
- b. Pembelian bahan serta alat kesehatan Covid-19 menyesuaikan kebutuhan;

- c. Terdapat beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tergantung ada tidaknya kasus. Misalnya kematian karena Covid-19 dan fogging DBD yang memang tidak bisa diprediksi kasusnya. Segala upaya sudah dikerahkan untuk menekan kasus Covid-19 maupun kasus DBD sehingga tidak ada kasus dan anggaran tidak dapat diserap.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah:

- Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Covid 19;
- Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan;
- Honor pemakaman dan pemulasaran jenazah tidak mengambil dari APBD, tetapi menggunakan BTT (Belanja Tidak Terduga) karena capaian kinerja fisik berbanding terbalik dengan capaian serapan anggaran.

### 3. Sasaran: Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran "Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan" didukung oleh tiga program yang masing-masing pagu dan serapannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan"

NO	SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	235.589.050	197.567.300	83,86%
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	178.376.700	156.390.391	87,67%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.130.949.900	989.398.750	87,48%
<b>JUMLAH</b>				<b>1.544.915.650</b>	<b>1.343.356.441</b>	<b>86,95%</b>

Program yang mendukung sasaran “Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan” adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Dari tabel di atas diketahui bahwa pada Tahun 2021 serapan anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah 83,86%, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar 87,67% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar 87,48%. Total anggaran yang diserap untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan” adalah 86,95%.

Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terserap antara lain:

- a. Sebagian penduduk sudah mengikuti JKN diluar Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yaitu baik yang mengikuti JKN secara mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU) maupun Penerima Bantuan Iuran dari pemerintah pusat (PBI). Berdasarkan hasil pemadanan data (rekonsiliasi), maka penduduk Kota Madiun yang sudah memiliki JKN sebesar 100,76%. Selain itu, dengan adanya rekonsiliasi dapat diketahui bahwa ada peserta JKN PBID yang meninggal dunia dan pindah sejumlah 9.721 orang dari Januari sampai Desember 2021;
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke sarana pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan di masa Pandemi covid 19;
- c. Pandemi Covid 19 menjadi berkurangnya kunjungan pasien ke Puskesmas (terutama untuk penyakit non kronis dan rawat inap) sehingga pemakaian obat obatan, BMHP, Reagen (di luar penanganan Covid 19) juga berkurang, sementara stok di gudang perbekalan masih cukup sehingga beberapa item barang yang kadaluarsa 2021 tidak dapat terpakai;
- d. Berkurangnya pelayanan Kesehatan gigi yang menyebabkan pemakaian bahan dan obat gigi juga berkurang, sementara stok masih cukup;
- e. Anggaran pengadaan alat Kesehatan yang baru bisa diserap mulai bulan Oktober 2021 karena menunggu PAK dan adanya gangguan server *e-purchasing*, mempersulit penyerapan anggaran pengadaan alat kesehatan. Selain itu, waktu yang singkat juga menyebabkan beberapa

alat kesehatan tidak bisa terbeli karena penyedia tidak bisa menyediakan dalam waktu singkat.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah:

- a. Pembelian obat dan BHP sesuai dengan kebutuhan;
- b. Koordinasi dengan BPJS untuk melakukan *updating* data dan rekonsiliasi sehingga estimasi target tidak selisih dengan realisasi;
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring dengan tetap melaksanakan protokol Kesehatan;
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat agar jumlah obat kadaluarsa dapat diminimalkan.

#### 4. Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk didukung oleh tiga program yang masing-masing pagu dan serapannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20. Serapan Anggaran pada Sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk"

NO	SASARAN		PROGRAM	ANGGARAN		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	Program Pengendalian Penduduk	300.956.040	288.128.831	95,74%
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.727.576.000	1.829.725.514	67,08%
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	257.495.200	245.764.359	95,44%
<b>JUMLAH</b>				<b>3.286.027.240</b>	<b>2.363.618.704</b>	<b>71,93%</b>

Program yang mendukung sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" adalah Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan Dan

Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang masing-masing serapan pada tahun 2021 sebesar 95,74%, 67,08% dan 95,44%. Secara keseluruhan, serapan untuk sasaran "Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk" sebesar 71,93% sehingga masih ada 28,07% anggaran yang belum terserap.

Beberapa hal yang menyebabkan kegiatan tidak terserap 100% antara lain adalah:

- a. Adanya nota kesepahaman antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan seluruh fasilitas layanan KB di Kota Madiun untuk tidak melakukan *double accounting* anggaran yaitu antara DAK BOKB dan BPJS Kesehatan. Sementara Kota Madiun sudah termasuk kota dengan Universal Health Coverage (UHC) sehingga banyak kegiatan layanan KB yang bersumber dana DAK BOKB tidak terserap, misalnya dana jasa medis.
- b. Jarak Fasilitas Kesehatan dalam Kota Madiun relatif dekat sehingga untuk pengiriman alat kontrasepsi (Alkon) di Kota Madiun hanya menyerap belanja makmin, transport dan pengepakan Alkon, sedangkan pengiriman Alkon lewat paket dan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak diserap.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Mengusulkan menu menu yang ada di BOKB sesuai pada saat *zoom meeting* dan membuat rencana kerja yang lebih mendekati ke kondisi lapangan sehingga bisa meningkatkan serapan dana BOKB.

## **5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Perbandingan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran

No	SASARAN		2021		
	Uraian	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Rata Rata Serapan Anggaran (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	101,25%	88,90%	1,14%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	116,66%	90,46%	1,29%
3	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	103,57%	86,95%	1,19%
4	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	<i>Total Fertility Rate (TFR) / Angka Kelahiran Total</i>	100,00%	71,93%	1,39%
<b>Rata - Rata</b>			<b>105,37%</b>	<b>84,56%</b>	<b>1,25%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa efisiensi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun mencapai 1,25%. Dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran efisien karena seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, target sasaran dapat tercapai tetapi anggaran dapat dihemat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun memiliki empat sasaran di tahun 2021, antara lain meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatnya pengendalian jumlah penduduk. Semua sasaran menunjukkan capaian kinerja di tahun 2021 sudah mencapai target yang ditentukan dengan masing-masing capaian kinerja sebesar 101,25%; 116,66%; 103,57% dan 100%. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebesar 105,37% dan berpredikat sangat baik.

Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebesar Rp. 271.050.008.693,00. Secara total persentase penyerapan keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun adalah 89,82% atau terdapat Rp. 27.591.217.911,00 yang tidak terserap. Walaupun terdapat 10,18% anggaran yang tidak terserap, namun pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menunjukkan efisiensi dengan nilai rata-rata efisiensi 1,25%. Dikatakan penggunaan anggaran efisien karena seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, target sasaran dapat tercapai tetapi anggaran dapat dihemat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai target kinerja sasaran.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya beberapa indikator SPM Kesehatan pada tahun 2021, antara lain Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan

Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.

2. Pemantauan terhadap rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
3. Perubahan peraturan yang sangat dinamis menjadi tantangan untuk menyesuaikan antara peraturan yang baru dengan dokumen yang sudah ada.
4. Adanya nota kesepahaman antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan seluruh fasilitas layanan KB di Kota Madiun untuk tidak melakukan *double accounting* anggaran yaitu antara DAK BOKB dan BPJS Kesehatan. Sementara Kota Madiun sudah termasuk kota dengan Universal Health Coverage (UHC) sehingga banyak kegiatan layanan KB yang bersumber dana DAK BOKB tidak terserap, misalnya dana jasa medis.

Beberapa upaya yang akan digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2022 antara lain:

1. Data sasaran SPM Kesehatan pada tahun 2022 menggunakan data Survei Keluarga Sehat sebagai data dasar sasaran karena metode pengambilan datanya menggunakan *total sampling*, jadi diharapkan bisa mewakili data riil di lapangan. Dengan data sasaran yang sesuai sasaran, maka diharapkan capaian SPM Kesehatan di tahun 2022 akan meningkat.
2. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi guna mengendalikan kinerja serta memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Pemantauan ini dengan mengisi *form* realisasi rencana aksi, sehingga dapat diketahui rencana aksi yang belum terlaksana. Dengan demikian dapat diketahui penyebab belum terlaksananya aksi sehingga dapat dicari alternatif solusi.
3. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk penyesuaian indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka akan merubah indikator sub kegiatan yang berarti akan merubah Renstra untuk tahun 2023-2024.

4. Membuat rencana kerja di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang lebih mendekati ke kondisi lapangan sehingga bisa meningkatkan serapan dana BOKB. Salah satu upaya tersebut dengan menabahkan kegiatan dan sub kegiatan baru pada Program Pengendalian Penduduk, yaitu menambahkan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dan Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

# LAMPIRAN

**MATRIKS RENSTRA PERUBAHAN 2019 -2024 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			NILAI SAKIP	A	83.5 (Skor)											
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah			INDEKS REFORMASI BIROKRASI (RB)		-		22,26		22,76		23,26		23,26			
			1 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	83.5 (Skor)	54.717.355.896	84 (Skor)	144.172.163.268	84.5 (Skor)	163.367.925.605	85 (Skor)	177.304.750.594	85 (Skor)	539.562.195.363	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 1 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100%	100%	218.278.000	100%	307.609.000	100%	316.837.270	100%	326.342.388	100%	1.169.066.658	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 1 201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	11 dokumen	11 dokumen	218.278.000	11 dokumen	307.609.000	11 dokumen	316.837.270	11 dokumen	326.342.388	11 dokumen	1.169.066.658	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 1 2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	50.653.907.416	100%	57.888.599.028	100%	56.292.582.440	100%	59.768.495.483	100%	224.603.584.367	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 1 202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	100%	29.691.891.460	100%	32.651.806.176	100%	30.762.074.303	100%	31.684.936.532	100%	124.790.708.471	Dinas Kesehatan, PP dan KB
						Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah (RSUD)	100%	100%	20.962.015.956	100%	25.236.792.852	100%	25.530.508.137	100%	28.083.558.951	100%	99.812.875.896	RSUD
			2 1 2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.273.541.480	100%	2.649.906.720	100%	2.700.907.200	100%	2.781.934.416	100%	10.406.289.816	Dinas Kesehatan, PP dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat					Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%							
			1	2	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100%	100%	1.973.541.480	100%	2.110.546.720	100%	2.145.366.400	100%	2.209.727.392	100%	8.439.181.992	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1	2	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	100%	300.000.000	100%	539.360.000	100%	555.540.800	100%	572.207.024	100%	1.967.107.824	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			X	XX	1	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (RSUD)</b>						<b>100%</b>	<b>1.432.649.498</b>	<b>100%</b>	<b>1.647.546.922</b>	<b>100%</b>	<b>3.080.196.420</b>	<b>RSUD</b>
			X	XX	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (RSUD)						100%	1.432.649.498	100%	1.647.546.922	100%	3.080.196.420	RSUD
			X	XX	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang (RSUD)</b>	100%	100%	1.274.000.000	100%	1.239.700.000	100%	1.361.367.000	100%	1.429.435.350	100%	5.304.502.350	<b>RSUD</b>
			X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah (RSUD)	100%	100%	1.274.000.000	100%	1.239.700.000	100%	1.361.367.000	100%	1.429.435.350	100%	5.304.502.350	RSUD
			1	2	1	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	297.629.000	100%	540.144.000	100%	556.348.320	100%	573.038.770	100%	1.967.160.090	<b>Dinas Kesehatan, PP dan KB</b>
			1	2	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100%	100%	201.098.000	100%	339.210.000	100%	349.386.300	100%	359.867.889	100%	1.249.562.189	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1	2	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	14.126.000	100%	16.019.000	100%	16.499.570	100%	16.994.557	100%	63.639.127	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1	2	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100%	100%	82.405.000	100%	184.915.000	100%	190.462.450	100%	196.176.324	100%	653.958.774	Dinas Kesehatan, PP dan KB
				2	01	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)</b>				<b>100%</b>	<b>81.546.204.520</b>	<b>100%</b>	<b>100.707.233.877</b>	<b>100%</b>	<b>110.777.957.265</b>	<b>100%</b>	<b>293.031.395.662</b>	<b>RSUD</b>

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%				
			1 2 1 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (RSUD)				100%	81.546.204.520	100%	100.707.233.877	100%	110.777.957.265	100%	293.031.395.662	RSUD
		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat			Persentase indikator SPM mencapai target	75%	50,00%		-		-		-		-		
		Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat			Indeks Keluarga Sehat		-		0,52		0,54		0,56		0,56		
		Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan			Persentase rumah sehat				88,00%		89,00%		90,00%		90,00%		
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan			Persentase capaian Aplikasi Sarana Prasarana Kesehatan (ASPAK) Puskesmas				84,60%		84,80%		85,00%		85,00%		
		Terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat Kota Madiun			Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan				98,00%		99,00%		100,00%		100,00%		
		Meningkatnya responsibilitas pelayanan kesehatan			Persentase Rata-rata nilai Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)				86,92%		87,53%		88,11%		88,11%		
			1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,50	133.309.487.965									
					Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target		-		66,67%	82.687.756.549	75,00%	162.988.308.912	75,00%	99.820.515.624	75,00%	478.806.069.050	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%			
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		86,96%	15.188.868.035	88,04%	21.778.024.971	89,13%	91.532.741.649	90,22%	26.221.281.343	90,22%	154.720.915.998		
			1 02 02 2.01	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara (RSUD)	2 unit	2.763.520.000	3 unit	3.704.902.925	2 unit	846.270.000	2 unit	973.210.500	9 unit	8.287.903.425	RSUD	
			1 02 02 2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (RSUD)	2 unit	3.114.374.000	5 jenis	3.662.542.171	4 jenis	65.743.228.000	0	-	11 jenis	72.520.144.171	RSUD	
			1 02 02 2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (RSUD)	20 jenis	-	17 jenis	3.887.685.500	1 jenis	2.000.000.000	0	-	38 jenis	5.887.685.500	RSUD	
			1 2 2 2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	-	2 kegiatan	1.740.099.110	2 kegiatan	2.144.069.364	2 kegiatan	2.330.357.968	2 kegiatan	2.400.268.707	2 kegiatan	8.614.795.149	Dinas Kesehatan, PP dan KB
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (RSUD)	47 jenis	32 jenis	3.020.650.000	1 jenis	3.061.600.000	15 jenis	14.221.082.368	15 jenis	16.354.244.724	63 jenis	36.657.577.092	RSUD
			1 2 2 2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	28 jenis	-	24 jenis	106.092.000	25 jenis	109.274.760	25 jenis	112.553.003	25 jenis	327.919.763	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			1 2 2 2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	-	1 paket	3.196.091.000	1 paket	2.486.947.630	1 paket	2.404.839.880	1 paket	2.476.985.076	4 paket	10.564.863.586	Dinas Kesehatan, PP dan KB
						Jenis obat/vaksin yang diadakan (RSUD)	16 jenis	6 jenis	502.009.000	2 jenis	1.997.371.545	6 jenis	3.000.000.000	6 jenis	3.000.000.000	6 jenis	8.499.380.545	RSUD
			1 2 2 2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	-	2 kegiatan	852.124.925	2 kegiatan	726.813.836	2 kegiatan	877.688.673	2 kegiatan	904.019.333	2 kegiatan	3.360.646.767	Dinas Kesehatan, PP dan KB
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	50%	118.120.619.930	66,67%	60.909.731.578	75,00%	71.455.567.263	75,00%	73.599.234.281	75,00%	324.085.153.052		
			1 2 2 2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	258.249.990	100%	450.537.020	100%	351.487.521	100%	362.032.146	100%	1.422.306.677	Dinas Kesehatan, PP dan KB



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%					
			1 2 2 202	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	23.339.000	100%	61.848.500	100%	60.771.648	100%	62.594.797	100%	208.553.945	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	40.809.000	100%	55.068.750	100%	23.308.900	100%	24.008.167	100%	143.194.817	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100%	100%	28.089.000	100%	235.565.550	100%	210.511.452	100%	216.826.795	100%	690.992.797	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	20.115.000	100%	79.719.000	100%	27.705.970	100%	28.537.149	100%	156.077.119	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	79,49%	100%	58.235.000	100%	222.209.500	100%	537.875.785	100%	554.012.059	100%	1.372.332.344	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65,62%	100%	1.440.000	100%	71.483.000	100%	54.170.893	100%	55.796.020	100%	182.889.913	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,60%	100%	4.000.000	100%	9.477.000	100%	9.761.310	100%	10.054.149	100%	33.292.459	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,55%	100%	3.850.000	100%	29.020.000	100%	29.890.600	100%	30.787.318	100%	93.547.918	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	40.565.000	100%	171.966.200	100%	177.125.186	100%	182.438.942	100%	572.095.328	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	19.320.000	100%	220.133.900	100%	237.535.510	100%	244.661.575	100%	721.650.985	Dinas Kesehatan, PP dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%					
			1 2 2 202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	101,27%	100%	152.359.000	100%	327.297.000	100%	337.115.910	100%	347.229.387	100%	1.164.001.297	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	241.376.000	100%	248.617.280	100%	256.075.798,40	100%	746.069.078	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Manguharjo	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	699.043.000	100%	528.392.060	100%	544.243.822	100%	1.771.678.882	Puskesmas
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Ngegong	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	694.686.000	100%	525.104.300	100%	540.857.429	100%	1.760.647.729	Puskesmas
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sukosari	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	742.692.000	100%	561.391.200	100%	578.232.936	100%	1.882.316.136	Puskesmas
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tawangrejo	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	768.929.000	100%	581.223.850	100%	598.660.566	100%	1.948.813.416	Puskesmas
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)Banjarejo	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	791.190.000	100%	598.050.960	100%	615.992.489	100%	2.005.233.449	Puskesmas
			1 2 2 202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demangan	persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB			-	100%	729.000.000	100%	551.050.000	100%	567.581.500	100%	1.847.631.500	Puskesmas
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	9,79%	9,70%	93.844.150	9,50%	59.009.860	9,40%	17.358.487	9,30%	17.879.242	9,30%	188.091.739	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Prevalensi kasus stunting	-	-	-	14,00%	266.050.000	13,00%	274.031.500	12,00%	282.252.445	12,00%	822.333.945	Puskesmas
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Ngegong	Prevalensi kasus stunting	-	-	-	12,00%	212.330.000	11,00%	218.699.900	10,00%	225.260.897	10,00%	656.290.797	Puskesmas

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%					
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Sukosari	Prevalensi kasus stunting	-	-	9,50%	281.900.000	9,30%	290.357.000	9,10%	299.067.710	9,10%	871.324.710	Puskesmas	
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Tawangrejo	Prevalensi kasus stunting	-	-	9,50%	249.475.000	9,40%	256.959.250	9,30%	264.668.028	9,30%	771.102.278	Puskesmas	
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Banjarejo	Prevalensi kasus stunting	-	-	11,50%	346.215.000	11,00%	356.601.450	10,50%	367.299.494	10,50%	1.070.115.944	Puskesmas	
			1 2 2 202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Puskesmas Demangan	Prevalensi kasus stunting	-	-	11,00%	326.000.000	10,50%	335.780.000	10,00%	345.853.400	10,00%	1.007.633.400	Puskesmas	
			1 2 2 202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	-	40%	61.459.550	41%	96.391.700	42%	88.605.132	43%	91.263.286	43%	337.719.668	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	85%	60%	118.431.090	61%	1.127.991.310	62%	569.718.276	63%	586.809.824	63%	2.402.950.500	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	100%	100%	190.862.000	100%	114.780.000	100%	136.248.400	100%	140.335.852	100%	582.226.252	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100%	100%	122.713.000	100%	162.910.950	100%	167.798.279	100%	172.832.227	100%	626.254.456	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	-	100%	83.380.000	100%	213.562.000	100%	219.968.860	100%	226.567.926	100%	743.478.786	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	83.859 orang	88.966 orang	23.627.334.000	87.520 orang	29.368.633.280	89.270 orang	41.295.891.640	91.056 orang	42.534.768.390	91.056 orang	136.826.627.310	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yang melaksanakan tatanan kelurahan sehat	-	48%	88.218.760	52%	691.002.050	56%	160.452.576	59%	165.266.153	59%	1.104.939.539	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan rumah sakit		100%	75.652.741.550							75.652.741.550	RSUD	
			1 2 2 202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Manguharjo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	90%	89,00%	2.687.530.000	89,00%	2.864.596.000	89,50%	2.950.533.880	90,00%	3.039.049.896	90,00%	11.541.709.776	Puskesmas
			1 2 2 202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Ngegong	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	88%	85,00%	2.016.602.840	85,50%	2.360.253.000	86,00%	2.431.060.590	86,50%	2.503.992.408	86,50%	9.311.908.838	Puskesmas
			1 2 2 202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sukosari	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	86%	87,80%	2.514.274.240	88,00%	2.809.017.000	88,50%	2.893.287.510	89,00%	2.980.086.135	89,00%	11.196.664.885	Puskesmas
			1 2 2 202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tawangrejo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	90%	89,00%	2.422.391.720	89,00%	2.607.873.000	89,17%	2.686.109.190	89,17%	2.766.692.466	89,17%	10.483.066.376	Puskesmas

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%					
			1 2 2 202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Banjarejo	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	93%	85,00%	3.064.193.200	85,00%	3.354.546.000	86,00%	3.455.182.380	87,00%	3.558.837.851	87,00%	13.432.759.431	Puskesmas
			1 2 2 202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas Demangan	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	87%	84,00%	2.673.853.600	85,00%	2.710.699.880	86,00%	2.792.020.876	87,00%	2.875.781.503	87,00%	11.052.355.859	Puskesmas
			1 2 2 202	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melaksanakan survei	100%	6 Faskes	1.285.628.240	6 Faskes	2.778.847.328	6 Faskes	2.862.212.748	6 Faskes	2.948.079.130	6 Faskes	9.874.767.446	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	100%	100%	307.491.000	100%	489.298.000	100%	503.976.940	100%	519.096.248	100%	1.819.862.188	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 2 202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pelaksanaan pelayanan gawat darurat	-	100%	459.300.000	100%	817.108.800	100%	841.622.064	100%	866.870.726	100%	2.984.901.590	Dinas Kesehatan, PP dan KB
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan				Indeks Kepuasan Masyarakat		81,99										
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan				Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi		-		90,00%		91,00%		92,00%		92,00%		
			1 2 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	89%	239.036.000	90%	279.413.000	91%	225.252.245	92%	232.009.812	93%	975.711.057	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 3 2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standar	1 dokter	1 dokter	30.000.000	1 dokter	48.750.000	1 dokter	50.212.500	1 dokter	51.718.875	1 dokter	180.681.375	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 3 202	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standar	1 dokter	1 dokter	30.000.000	1 dokter	48.750.000	1 dokter	50.212.500	1 dokter	51.718.875	1 dokter	180.681.375	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 3 203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	-	89%	209.036.000	90%	230.663.000	91%	175.039.745	92%	180.290.937	92%	795.029.682	Dinas Kesehatan, PP dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat								50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%				
			1	2	3	203	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	-	89%	209.036.000	90%	230.663.000	91%	175.039.745	92%	180.290.937	92%	795.029.682	Dinas Kesehatan, PP dan KB
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kefarmasian							Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standar	-			74%		76%		78%		78%		
		Meningkatnya responsivitas pelayanan kesehatan							Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) puskesmas se- Kota Madiun	-			86,2		86,4		86,6		86,6		
			1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar		86%	202.270.000	87%	226.563.000	88%	233.359.890	89%	240.360.686	89%	902.553.576	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1	2	4	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar		85%	196.245.000	86%	196.057.000	87%	201.938.710	88%	207.996.871	88%	802.237.581	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1	2	4	2,01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	-	85%	196.245.000	86%	196.057.000	87%	201.938.710	88%	207.996.871	88%	802.237.581	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1	2	4	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)		70%	6.025.000	73%	30.506.000	76%	31.421.180	80%	32.363.815	80%	100.315.995	Dinas Kesehatan, PP dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%		
			1 2 4 2,04 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)		70%	6.025.000	73%	30.506.000	76%	31.421.180	80%	32.363.815	80%	100.315.995	Dinas Kesehatan, PP dan KB
		Meningkatnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat			Persentase rumah tangga sehat		-		70%		71%		72%		72%		
		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat			Persentase rata-rata Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berstrata PURI		-		62,00%		62,50%		63,00%		63%		
			1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	-	61,50%	973.197.000	62%	2.492.754.000	62,50%	1.157.179.250	63,00%	1.191.894.628	63,00%	5.815.024.878	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 5 2,01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	-	100%	83.275.000	100%	351.315.000	100%	365.219.460	100%	376.176.044	100%	1.175.985.504	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			1 2 5 2,01 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	-	6 jenis	83.275.000	6 jenis	351.315.000	6 jenis	365.219.460	6 jenis	376.176.044	6 jenis	1.175.985.504	Dinas Kesehatan, PP dan KB
					Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	-	3 Kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		
			1 2 5 203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	-	74,07%	889.922.000	77,78%	2.141.439.000	77,78%	791.959.790	77,78%	815.718.584	77,78%	4.639.039.374	Dinas Kesehatan, PP dan KB



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%		
	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk di Kota Madiun				Contraception Prevalency Rate (CPR) diatas rata-rata Nasional				62,54%		63,00%		64,00%		64,00%		
			2 14 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	-	4 SSK	227.126.340	7 SSK	1.007.243.200	8 SSK	963.929.671	9 SSK	1.012.262.478	9 SSK	3.210.561.688	Dinas Kesehatan, PP dan KB
					Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna		3 KAMPUNG KB		4 KAMPUNG KB		5 KAMPUNG KB		6 KAMPUNG KB		6 KAMPUNG KB	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			2 14 3 201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	-	4 sekolah	5.000.000	5 Sekolah	110.146.200	6 Sekolah	22.269.836	7 Sekolah	22.937.931	7 Sekolah	160.353.967	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 201 7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SSK baru yang dibentuk	-	2 SSK	5.000.000	3 SSK	110.146.200	1 SSK	22.269.836	1 SSK	22.937.931	5 SSK	160.353.967	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 2 202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdate	-	100%	222.126.340	100%	644.955.220	100%	664.303.877	100%	684.232.993	100%	2.215.618.429	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 2 202 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	-	27 kelurahan	222.126.340	27 kelurahan	644.955.220	27 kelurahan	664.303.877	27 kelurahan	684.232.993	27 kelurahan	2.215.618.429	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang terlibat dalam program Bangga Kencana (Kampung KB)		>50%		>51%	252.141.780	>52%	277.355.958	>53%	305.091.554	53%	834.589.292	
			2 14 3 2.04 1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan pertemuan Pokja KKB		28 kali		14 kali	252.141.780	7 kali	277.355.958	7 kali	305.091.554	7 kali	834.589.292	



No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%		
			2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya <i>Unmet Need</i>	-	16,93%	2.733.736.500	8,00%	2.662.676.929	7,50%	2.867.064.740	7,00%	2.953.076.682	7,00%	11.216.554.851	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	-	100%	1.507.430.000	100%	309.395.000	100%	350.498.700	100%	361.013.661	100%	2.528.337.361	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 201 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	-	4 Jenis	-	4 Jenis	187.895.000	4 Jenis	123.643.260	4 Jenis	127.352.558	4 Jenis	438.890.818	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 201 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangsa Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	3 Balai	6 Kelompok	1.507.430.000	6 Kelompok	121.500.000	6 Kelompok	226.855.440	6 Kelompok	233.661.103	6 Kelompok	2.089.446.543	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 202 4	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	-	100%		100%	128.520.000	100%	133.488.000	100%	137.492.640	100%	399.500.640	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 202 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	-	148 kader	-	148 kader	128.520.000	148 kader	133.488.000	148 kader	137.492.640	148 kader	399.500.640	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka <i>Drop Out</i>		<15%	1.226.306.500	<19,5%	2.104.011.929	<18%	2.226.402.680	<17,5%	2.293.194.760	<17,5%	7.849.915.869	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 203 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokan dan sarana penunjang pelayanan KB	-	22 faskes	-	22 faskes	138.237.529	22 Faskes	53.318.980	22 Faskes	54.918.549	22 Faskes	246.475.058	Dinas Kesehatan, PP dan KB
			2 14 3 203 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	-	651 aseptor	128.299.500	661 Aseptor	797.070.400	671 aseptor	1.237.538.820	681 aseptor	1.274.664.985	681 aseptor	3.437.573.705	Dinas Kesehatan, PP dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Sehat				Persentase Keluarga Sehat		50,00%		52,00%		54,00%		56,00%		56,00%			
			2 14 3 203 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	-	2 paket	1.098.007.000	5 paket	1.168.704.000	1 paket	935.544.880	1 paket	963.611.226	9 paket	4.165.867.106	Dinas Kesehatan, PP	
			2 14 3 204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	-	100%	-	100%	120.750.000	100%	156.675.360	100%	161.375.621	100%	438.800.981	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			2 14 3 204 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBP di kampung KB	-	3 kegiatan	-	3 kegiatan	120.750.000	3 kegiatan	156.675.360	3 kegiatan	161.375.621	3 kegiatan	438.800.981	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	81,67%	80,25%	210.526.080	81,00%	1.331.867.514	82,00%	784.633.813	83,00%	808.172.827	83,00%	3.135.200.234	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			2 14 4 201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	-	28%	210.526.080	30%	1.331.867.514	31%	784.633.813	32%	808.172.827	32%	3.135.200.234	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			2 14 4 201 4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	2 Kegiatan	13.412.600	2 Kegiatan	818.750.514	2 Kegiatan	77.661.537	2 Kegiatan	79.991.383	2 Kegiatan	989.816.034	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
			2 14 4 201 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	3 Kegiatan	197.113.480	3 Kegiatan	513.117.000	3 Kegiatan	706.972.276	3 Kegiatan	728.181.444	3 Kegiatan	2.145.384.200	Dinas Kesehatan, PP dan KB	
TOTAL									192.612.735.781		234.860.437.460		332.587.654.125		283.563.043.331		1.043.623.870.697	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,5 (skor)
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	50%
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun	81,99
4.	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	<2,1

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 68.817.477.025,00	-
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 197.401.588.778,00	-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 235.589.050,00	-
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 178.376.700,00	-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.130.949.900,00	-
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 300.956.040,00	-
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 2.727.576.000,00	-
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 257.495.200,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 271.050.008.693,00</b>	

Madiun, Oktober 2021



**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KOTA MADIUN**



**dr. DENIK WURYANI**

Pembina

**NIP. 19671227 200212 2 001**

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**  
**TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS					PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)			KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	Persentase Indikator SPM mencapai target	50,00%	58,33%	116,66%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 197.401.588.778,00	Rp 178.575.933.300,00	90,46%
2.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun	81,99	84,917	103,57%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 235.589.050,00	Rp 197.567.300,00	83,86%
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 178.376.700,00	Rp 156.390.391,00	87,67%
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.130.949.900,00	Rp 989.398.750,00	87,48%
3.	Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total	<2,1	2,1	100,00%	Program Pengendalian Penduduk	Rp 300.956.040,00	Rp 288.128.831,00	95,74%
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 2.727.576.000,00	Rp 1.829.725.514,00	67,08%
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 257.495.200,00	Rp 245.764.359,00	95,44%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83,5 (Skor)	84,54	101,25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.817.477.025,00	Rp 61.175.882.337,00	88,90%

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

- Adanya kerja sama dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal
- Adanya perencanaan yang baik, kerja sama lintas program dan lintas sektor baik dan partisipasi masyarakat yang tinggi ( Kader aktif )
- Ketersediaan barang di beberapa penyedia cukup sehingga bisa mensupply barang lebih cepat
- Adanya pertemuan kegiatan penyediaan dan pengembangan materi kependudukan bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sehingga SSK makin dirasa kegunaannya bagi warga sekolah
- Adanya kegiatan pemantauan pengisian data di aplikasi Kampung KB terutama kegiatan yang bersifat intervensi
- Pembinaan dan evaluasi kader dasyat untuk mendampingi kasus *Unmet Need* (UN) yang ada di wilayahnya untuk menjadi peserta KB
- Adanya sarana penunjang penyuluhan dalam bentuk permainan yang lebih menarik sehingga menarik antusiasme anggota poktan untuk ber-KB

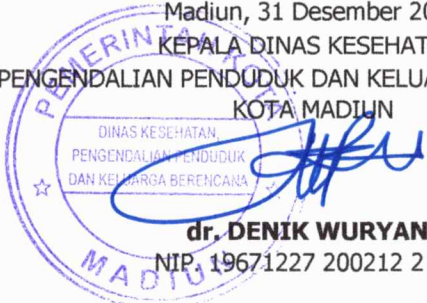
Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Perubahan peraturan yang sangat dinamis menjadi tantangan untuk menyesuaikan antara peraturan yang baru dengan dokumen yang sudah ada
- Adanya jadwal kegiatan yang bersamaan, peran ganda sebagian kader dan adanya pandemi yang mengakibatkan aktifitas kader berkurang
- E katalog sempat sulit di akses, sehingga menghambat pengadaan
- Kesulitan dalam sinkronisasi waktu kegiatan dengan lintas sektoral seperti tim penilai, organisasi profesi
- Penyerapan anggaran khususnya yang bersumber dana DAK BOKB mempunyai juknis tersendiri sehingga bisa overlapping bila diserap misal dana jasa medis layanan KB padahal sudah dicukupi dengan dana dari BPJS

Rencana Tindak Lanjut pada triwulan selanjutnya :

- Berkoordinasi dengan Bappelitbangda untuk penyesuaian indikator sesuai Kemendagri No 050-5889 tahun 2021
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor di Dinas Kesehatan PP dan KB, Puskesmas dan lembaga lain (sarana kesehatan, Organisasi Profesi)
- Mengusulkan menu menu yang ada di BOKB sesuai pada saat zoom dan Membuat rencana kerja yang lebih mendekati ke kondisi lapangan sehingga bisa meningkatkan serapan dana BOKB

Madiun, 31 Desember 2021  
KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MADIUN



**dr. DENIK WURYANI**  
NIP. 19671227 200212 2 001